

BAB IV

ANALISA DATA

IV. 1. Analisa Terhadap Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Analisa pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dibuat berdasarkan kuisisioner pengendalian intern pemberian kredit. Pada dasarnya pertanyaan yang disusun meliputi ada tidaknya unsur-unsur pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. Adapun unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro berdasarkan kuisisioner (lihat lampiran 1) adalah sebagai berikut :

- a. Petugas yang kompeten dan dapat dipercaya.
 - Petugas yang menangani proses pemberian kredit mengetahui dengan jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.
 - Petugas yang menangani kredit memiliki latar belakang pendidikan dan *training* tentang perkreditan secara umum dan khusus.
- b. Pemisahan tugas yang memadai.
 - Pemisahan fungsi yang menyetujui kredit dan fungsi operasi.
 - Pemisahan antara tim kredit dan fungsi administrasi kredit.
 - Pemisahan antara tim kredit dan fungsi akuntansi.
 - Pemisahan tim kredit dan fungsi kas.
 - Pemisahan fungsi yang menyetujui kredit dan penilai jaminan.

- c. Prosedur otorisasi yang wajar terhadap dokumen-dokumen yang digunakan.
- Surat permohonan kredit di otorisasi oleh *marketing operational* dan kepala seksi kredit umum.
 - Surat putusan kredit di otorisasi oleh tim kredit.
 - Surat instruksi realisasi / pencairan kredit di otorisasi oleh bagian administrasi kredit dan bagian operasional.
 - Surat perjanjian kredit di otorisasi oleh tim kredit di hadapan notaris.
 - Bukti kas keluar di otorisasi oleh bagian operasional dan setiap pergerakan rekening pinjaman dilaporkan kepada bagian administrasi kredit.
- d. Dokumen dan catatan yang memadai.
- Administrasi kredit mengenai kewajiban nasabah (angsuran) selalu termonitor dengan baik, dengan melihat rekening koran kreditur dan melihat rekening kontrol.
 - Kelengkapan data nasabah terpenuhi dan terjaga dengan baik, yang meliputi data ekonomis, keuangan, teknis, yuridis dan sebagainya.
- e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan.
- Dilakukan audit ditempat (*on the spot*) sebelum dan selama masa kredit, yang meliputi audit kegiatan usaha dan peninjauan perkembangan usaha, hal ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pencatatan dalam dokumen pendukung kredit.

- Secara periodik bagian operasional mengumpulkan daftar kas keluar dan masuk untuk dicocokkan dengan bukti pembukuan dan data pada komputer dan selanjutnya diteruskan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan verifikasi.

Dari hasil kuesioner, ada satu unsur pengendalian intern yang tidak ada pada pengendalian intern pemberian kredit PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jawaban “tidak” pada kuesioner yang diberikan (lihat lampiran 1). Adapun elemen-elemen pengendalian intern yang tidak terdapat pada PT. BPR Eka Bumi Artha adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapatnya *appraisal company* atau perusahaan independen yang khusus melakukan penilaian jaminan yang ditunjuk oleh bank. Semua penilaian dilakukan oleh petugas bank. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penilaian dan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penilaian jaminan.

Analisa yang dilakukan terhadap pengendalian intern pemberian kredit PT. BPR Eka Bumi Artha Metro hanya menunjukkan masih ada satu kekurangan yang disebabkan adanya satu unsur pengendalian intern yang tidak terdapat pada sistem pemberian kredit. Kekurangan tersebut adalah tidak adanya perusahaan independen yang melakukan taksasi agunan atau penilaian jaminan pada permohonan kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro.

IV. 2. Pengujian Pengendalian Terhadap Pengendalian Intern Pemberian Kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro

Adapun untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengendalian intern pemberian kredit yang dimiliki PT. BPR Eka Bumi Artha Metro, maka harus dilakukan pengujian pengendalian. Dalam melakukan pengujian pengendalian, pengujian tidak dilakukan terhadap semua bukti, namun hanya pada sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian intern pemberian kredit yang dikumpulkan benar-benar dilaksanakan. Sedangkan tujuan dilakukannya pengujian pengendalian adalah untuk menilai efektivitas pengendalian intern yang dijalankan entitas. Adapun dalam pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro penulis menggunakan *attribute sampling* model *stop-or-go sampling*.

Model *attribute sampling* yang digunakan adalah *stop-or-go sampling* (*decision attribute sampling*), karena penulis menilai bahwa pengendalian intern prosedur pemberian kredit PT. BPR Eka Bumi Artha Metro sudah dijalankan dengan baik. Pertimbangan lain adalah bahwa kemungkinan ditemukannya kesalahan dari sampel dalam populasi yang akan diperiksa adalah kecil dan selain itu model ini digunakan untuk menghindari pengambilan sampel yang terlalu banyak.

Attribute-attribute yang akan diperiksa adalah karakteristik dari dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit. *Attribute* yang akan

diperiksa dalam dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dipilah dalam beberapa karakteristik:

- a. Karakteristik surat permohonan kredit.
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu kepala seksi kredit umum.
- b. Karakteristik dokumen pendukung surat permohonan kredit.
 - Adanya persyaratan permohonan kredit berupa fotokopi KTP pemohon dan sertifikat hak milik jaminan.
- c. Karakteristik surat perjanjian kredit.
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu direksi.
- d. Karakteristik dokumen pendukung surat perjanjian kredit.
 - Adanya laporan hasil analisa kredit.
- e. Karakteristik formulir bukti pengambilan kredit.
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu staf administrasi kredit umum dan kasir.
- f. Karakteristik dokumen pendukung bukti pengambilan kredit.
 - Adanya surat persetujuan permohonan kredit.

Setelah menentukan *attribute* kemudian langkah berikutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian. Dalam melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern prosedur pemberian kredit, populasi yang akan diambil sampelnya adalah dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit. Dokumen-dokumen tersebut berupa; (1) surat permohonan kredit, (2) surat perjanjian kredit dan

(3) bukti pengambilan pinjaman (kredit) untuk periode 1 Januari 2000 – 31 Desember 2000 yang telah diurutkan dengan Nomor Pokok Pinjaman masing-masing nasabah (lihat lampiran XXII).

Setelah itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan penulis dalam menggunakan *stop-or-go sampling*. Prosedur tersebut meliputi:

- a. Menentukan *desired upper precision limit* (DUPL) dan *reliability level*.
- b. Menentukan sampel pertama yang harus diambil dengan menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian.
- c. Memilih anggota sampel dari seluruh populasi menggunakan tabel angka acak.
- d. Buat tabel *stop-or-go decision*.
- e. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Dalam melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern pemberian kredit, penulis memilih menggunakan *reliability level* sebesar 95% dan *desired upper precision limit* sebesar 5% karena penulis percaya bahwa pengendalian intern pemberian kredit telah berjalan dengan baik. Selanjutnya penulis mengambil tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian (*Zero Expected Occurrences*) guna menentukan besarnya sampel minimum. Cara menentukan besarnya sampel minimum adalah dengan melihat titik potong garis DUPL dengan kolom *reliability* yang dipilih. Dalam penelitian ini penulis telah menentukan $DUPL = 5\%$ dan $reliability\ level = 95\%$, maka

berdasarkan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian adalah 60 (lihat tabel IV. 1).

Tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian			
DUPL	Besarnya Sampel atas Dasar Reliability Level		
	90%	95%	97,5%
10 %			
9			
8			
7			
6			
5		60	
4			

Tabel IV. 1. Cara Pencarian Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih anggota sampel dari seluruh populasi. Agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel maka digunakan tabel angka acak untuk memilih anggota sampel (lihat lampiran V). Tabel tersebut berisi kolom-kolom dan jajaran angka-angka. Auditor dapat memulai dari angka manapun kemudian ditelusur ke kolom atau jajaran angka sehingga ditemukan yang mengidentifikasi nomor satuan sampel (misal nomor faktur atau nomor cek). Jika tidak ada angka yang mengidentifikasi satuan sampel, maka auditor menetapkan hubungan antara populasi dengan angka acak dengan memberi nomor pada masing-masing unsur populasi. Pada pengujian ini penulis menggunakan Nomor Pokok Pinjaman. Tabel angka acak yang digunakan adalah tabel angka acak lima digit sedangkan Nomor Pokok Pinjaman terdiri atas empat digit,

sehingga dalam memilih sampel angka acak lima digit dihilangkan satu digit terakhir.

Setelah anggota sampel terpilih dari seluruh anggota populasi, langkah selanjutnya adalah membuat tabel *stop-or-go decision*. Dalam tabel *stop-or-go decision* tersebut penulis akan mengambil penambahan sampel sampai 4 kali. Umumnya dalam merancang tabel *stop-or-go decision* penulis jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali. Berikut ini tabel *stop-or-go decision* :

Langkah ke-	Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan	Berhenti Jika Kesalahan Kumulatif Terjadi dengan	Jika yang Sama	Lanjutkan ke Langkah Berikutnya Jika Kesalahan Terjadi dengan	Lanjutkan ke Langkah 5 Jika Kesalahan Paling Tidak Sebesar
1	60	0		1	4
2	96	1		2	4
3	126	2		3	4
4	156	3		4	4
5	Gunakan <i>fixed sample-size-attribute sampling</i>				

Tabel IV. 2. Tabel *Stop-or-Go Decision*

Setelah menentukan jumlah sampel pertama yang akan diambil dan membuat *stop-or-go decision*, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dari tiap-tiap dokumen yang akan diperiksa. Berdasarkan evaluasi hasil pemeriksaan ditemukan hasil, sebagai berikut:

a. Surat permohonan kredit.

Pada langkah pertama, penulis melakukan pemeriksaan terhadap 60 lembar surat permohonan kredit. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan

yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kredit Umum dalam melakukan otorisasi terhadap surat permohonan kredit (lihat lampiran XIII), maka penulis akan menghentikan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dihentikan karena $DUPL = AUPL$, pada tingkat kesalahan sama dengan 0 AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{Sample size}}$$

Menurut tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 surat permohonan kredit adalah 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa otorisasi terhadap formulir permohonan kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah efektif, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Adanya tandatangan pada surat permohonan kredit merupakan bentuk otorisasi pertama yang dilakukan oleh pejabat bank yang menyatakan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah telah memenuhi persyaratan dan dapat diproses lebih lanjut.

Berikut ini cara pencarian *confidence level factor* pada tabel berikut:

Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sample Sizes and Upper Precision Limit of Population Occurrence Rate Based on Sample Result			
Jumlah Kesalahan	Confidence level		
	90 %	95 %	97,5%
0	→ 3,0		
1			
2			
3			

Tabel IV. 3. Pencarian *Confidence Level Factor*

b. Dokumen pendukung surat permohonan kredit.

Dalam pemeriksaan terhadap 60 dokumen pendukung permohonan kredit berupa fotokopi KTP dan sertifikat hak milik jaminan, penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan dokumen (lihat lampiran XIII), sehingga penulis tidak melanjutkan pengambilan sampel karena $DUPL = AUPL$. Berdasarkan tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 dokumen pendukung surat permohonan kredit sama dengan 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa adanya dokumen pendukung surat permohonan kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah baik atau efektif, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Adanya dokumen pendukung surat permohonan kredit merupakan syarat pertama yang harus diajukan nasabah bersama surat permohonan kredit yang menjadi jaminan keberadaan atau tempat tinggal nasabah serta bukti keabsahan atas kepemilikan barang yang dijadikan jaminan kredit.

c. Surat perjanjian kredit.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis terhadap 60 surat perjanjian kredit, penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan dalam otorisasi oleh Direksi (lihat lampiran XIV), oleh karena itu penulis akan menghentikan pengambilan sampel karena $DUPL = AUPL$. Berdasarkan tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 surat perjanjian kredit sama dengan 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa otorisasi terhadap surat perjanjian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah baik atau efektif, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Adanya otorisasi Direksi pada surat perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kekayaan bank. Perjanjian kredit yang diikat oleh hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pada pemberian kredit, karena tanpa adanya pengikatan berdasarkan hukum

memungkinkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dari nasabah yang memang mempunyai itikad buruk. Surat perjanjian kredit dalam pemberian kredit dimaksudkan sebagai alat perlindungan bagi kredit dan harta perusahaan karena apabila muncul kemacetan atau hal yang tidak terduga dalam pembayaran kembali kredit tersebut maka pihak bank dapat mengambil alih jaminan tersebut sebagai ganti dari pembayaran kredit yang macet atau menuntut di muka hukum.

d. Dokumen pendukung surat perjanjian kredit.

Dalam pemeriksaan terhadap 60 dokumen pendukung surat perjanjian kredit berupa laporan hasil analisa kredit penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan dokumen (lihat lampiran XIV), maka penulis akan menghentikan pengambilan sampel karena $DUPL = AUPL$. Berdasarkan tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 surat perjanjian kredit sama dengan 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa adanya dokumen pendukung surat perjanjian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah baik atau efektif, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Adanya dokumen pendukung surat perjanjian kredit yang berupa hasil analisa kredit merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap

- permohonan kredit yang diajukan bahwa permohonan kredit nasabah telah dianalisa kelayakannya dan telah disetujui.
- e. Bukti pengambilan kredit.

Dalam pemeriksaan terhadap 60 bukti pengambilan kredit penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh Staf Administrasi Kredit dan Kasir dalam melakukan otorisasi terhadap bukti pengambilan kredit (lihat lampiran XV), maka penulis akan menghentikan pengambilan sampel karena $DUPL = AUPL$. Berdasarkan tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 bukti pengambilan kredit sama dengan 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa otorisasi terhadap bukti pengambilan kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah baik atau efektif, karena $AUPL$ tidak melebihi $DUPL$.

Adanya otorisasi Staf Administrasi Kredit dan Kasir pada bukti pengambilan kredit merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap pencairan dana kredit yang telah disetujui dan telah dicairkan serta pengadministrasian dan pengarsipan data-data dari kredit yang telah dikeluarkan oleh bank.

f. Dokumen pendukung bukti pengambilan kredit.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis terhadap 60 dokumen pendukung bukti pengambilan kredit, penulis tidak menemukan adanya kesalahan atau kekurangan pada kelengkapan dokumen pendukung tersebut (lihat lampiran XV), sehingga penulis menghentikan pengambilan sampel karena $DUPL = AUPL$. Berdasarkan tabel 9 (lihat lampiran X), *confidence level factor* pada $R = 95\%$ dan tingkat kesalahan sama dengan 0 adalah 3, sehingga $AUPL = 3/60 = 5\%$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 didapatkan $DUPL = AUPL$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 dokumen pendukung bukti pengambilan kredit sama dengan 0 (nihil). Maka unsur pengendalian intern yang berupa adanya surat persetujuan permohonan kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah baik atau efektif, karena $AUPL$ tidak melebihi $DUPL$.

Adanya surat persetujuan permohonan kredit pada prosedur pemberian kredit merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kekayaan bank. Persetujuan permohonan kredit merupakan suatu hal yang sangat penting pada pemberian kredit, karena tanpa adanya persetujuan permohonan kredit tersebut memungkinkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dari nasabah atau pihak-pihak yang memang mempunyai itikad buruk.

Hasil keseluruhan dari pemeriksaan yang dilakukan, dapat dilihat dalam tabel pemeriksaan terhadap *attribute sampling* berikut ini:

Nama Perusahaan : PT. BPR Eka Bumi Artha Metro Tujuan Pemeriksaan : Menilai efektivitas pengendalian intern pemberian kredit Model <i>Attribute Sampling</i> : <i>Stop-Or-Go Attribute Sampling</i> DUPL : 5% Populasi : Surat permohonan kredit, Dokumen pendukung surat permohonan kredit, Surat perjanjian kredit, Dokumen pendukung surat perjanjian kredit, Bukti pengambilan kredit, Dokumen pendukung bukti pengambilan kredit.						
Unit Sampling	Attribute	Jumlah Sampling	Jumlah Salah	AUPL	DUPL	Kesimpulan
Surat permohonan kredit	Otorisasi kasie kredit umum	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif
	Fotokopi KTP dan sertifikat hak milik jaminan	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif
Surat perjanjian kredit	Otorisasi direksi	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif

	Hasil analisa kredit	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif
Bukti pengambilan kredit	Otorisasi staf administrasi kredit dan kasir	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif
	Surat persetujuan permohonan kredit	60	0	5	5	Unsur pengendalian intern efektif

